



Jurnal Pendidikan Universitas Garut
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan
Universitas Garut
ISSN: 1907-932X

Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa

Ieke Sartika Iriany

Guru Besar Ilmu Sosial di Universitas Garut

Abstrak

Pendidikan karakter (character education) dalam konteks kekinian, sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara Indonesia tercinta. Krisis tersebut antara lain berupa maraknya korupsi, meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan kerusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu jelas betapa pentingnya pendidikan karakter. Kenyataan obyektif yang penulis uraikan secara faktual yang menimpa bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia nyaris kehilangan "jati dirinya", Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah sangat berat. Berbagai peristiwa tahun-tahun terakhir ini sungguh mengancam eksistensi bangsa, merebaknya konflik sosial dan teror kekerasan yang tak terkendali telah menghancurkan modal sosial yang begitu penting bagi keutuhan moral kehidupan bersama. Wabah korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela telah menjadikan kita sebagai bangsa yang memiliki rendahnya rasa saling percaya kepada sesama (low trust society). Berdasarkan fenomena obyektif yang dipaparkan tersebut, maka sepatutnya harus dilakukan tindakan afirmatif untuk melakukan revitalisasi jati diri bangsa, khususnya melalui pendidikan karakter, agar dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia; Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila, yang merupakan pengejawantahan dari konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereignty dan sosialitas. Revitalisasi jati diri bangsa Indonesia berarti membangun atau memperkokoh kembali jati diri setiap manusia Indonesia, yang tiada lain adalah membangun Manusia Pancasila yang ber-ahlak, bermoral dan bertanggungjawab.

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Jati diri bangsa dan Revitalisasi

1 Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Karena itu perlu kesepakatan dalam memahami makna konsep pendidikan karakter bangsa, yang berkaitan erat dengan jati diri bangsa Indonesia.

Menyimak amanat undang-undang Sisdiknas tersebut, maka pendidikan dapat diartikan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan hanya sekedar sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas dari itu adalah sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi). Seorang manusia harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yakni:

- (1) Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis;
- (2) Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (3) Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Penguatan pendidikan moral (*moral education*) atau pendidikan karakter (*character education*) dalam konteks kekinian, sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara Indonesia tercinta. Krisis tersebut antara lain berupa maraknya korupsi, meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu jelas betapa pentingnya pendidikan karakter.

Dewasa ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, seperti dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Namun walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sebagaimana data berikut:

Tabel 1. Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan
Tahun 2004-2014 (*per 30 November 2014*)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	3	76
Kepala Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	20
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	12
Walikota/ Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	9	42
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	116
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	13	107
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	48
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	48	442

Sumber: KPK.go.id Januari 2015

Data pada Tabel 1 tersebut, sungguh sangat memprihatinkan, betapa banyaknya PNS dan orang-orang yang diberikan amanah sebagai wakil rakyat dan para birokrat pemimpin bangsa ini yang telah menyelewengkan amanahnya, telah menunjukkan moralitas dan akhlak yang buruk, inilah 'wajah Indonesia saat ini?'.

Masalah pergaulan bebas di Indonesia, didefinisikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, "bebas" yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas di Indonesia sering didengar dari lingkungan mana pun, baik dari media massa. Telah jelas di Indonesia tidak adanya rancangan pembentukan Undang-Undang legalisasi aborsi, karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Agama, dan Hukum yang berlaku. Legalisasi aborsi akan mendorong pergaulan bebas lebih jauh dalam masyarakat. Data statistik nasional mengenai penderita HIV/ AIDS di Indonesia menunjukkan bahwa Pada tahun 2012 sekitar 75% terjangkit hilangnya daya tahan tubuh pada usia remaja.

Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan jumlah remaja di Indonesia mencapai 30% dari jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan bahwa banyak yang menikah di usia remaja, seks pranikah dan kehamilan tidak diinginkan, aborsi. Sedangkan dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat di kalangan remaja. Dari 2,21% (4 juta orang) pada tahun 2010 menjadi 2,8 (sekitar 5 juta orang) pada tahun 2011.

Narkoba, aborsi, pornoaksi, pornografi dan perusakan lingkungan yang tak tercegah menjadi "wabah sosial" yang mengancam masa depan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai masalah tersebut telah menjadi penyakit sosial yang secara ekonomi dan moral mengancam kelangsungan hidup bangsa dan generasi di masa datang. Berikut kasus narkoba yang sangat memprihatinkan peningkatannya dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Jumlah Kasus Narkoba

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Narkotika	3.874	8.171	28.188	43.512	43.148	41.348
Psikotropika	3.887	6.733	21.318	33.595	33.759	38.959
Bahan Adiktif	648	1.348	4.639	7.034	9.521	9.241
WNI	11.242	22.695	81.948	128.468	134.916	132.516
WNA	81	85	433	708	535	585
Pria	10.263	21.046	76.037	118.908	125.047	129.347
Wanita	1.060	1.734	6.344	10.270	10.413	9.213
> 15 tahun	71	127	498	663	644	544
16-29 tahun	6.530	13.613	48.849	67.453	65.527	63.577
> 30 tahun	4.722	9.040	33.334	52.060	57.569	59.549
SD	1.300	2.542	8.449	12.848	13.708	11.208
SLTP dan SLTA	9.206	19.489	73.253	110.970	110.627	100.527
Perguruan Tinggi	817	749	3.987	5.358	5.075	5.975
PNS	64	137	449	678	734	634

Sumber: BNN Republik Indonesia, Tahun 2014

Angka pengguna narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus mengalami peningkatan. Badan Narkotika Nasional (BNN) memproyeksikan terdapat 2,8 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia, atau setara dengan 5,8 juta penduduk pada tahun 2012. Dan di tahun 2015 diperkirakan pengguna narkoba mencapai angka 5,8 juta hingga 6 juta atau 2,8 persen dari penduduk Indonesia.

Selanjutnya data dari Komnas Anak, jumlah tawuran pelajar sudah memperlihatkan kenaikan pada enam bulan pertama tahun 2012. Hingga bulan Juni, sudah terjadi 139 tawuran kasus tawuran antar sekolah, Sebanyak 12 kasus menyebabkan kematian. Pada 2011, ada 339 kasus tawuran menyebabkan 82 anak meninggal dunia.

Jumlah kenakalan remaja setiap tahun tidak hanya diakibatkan oleh satu perilaku menyimpang, tetapi akibat berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan agama, norma masyarakat atau tata tertib sekolah yang dilakukan oleh remaja, dan akibat dari kenakalan remaja pasti akan berimbas pada remaja tersebut. Apabila tidak segera diselesaikan, akan tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian buruk dan merugikan orang lain. ([http:// kenakalan-remaja.blogspot.com](http://kenakalan-remaja.blogspot.com), tanggal 9 januari 2013 jam 13.30).

Salah satu parameter kondisi kehidupan seks di Indonesia adalah angka aborsi. Berikut ini adalah angka aborsi di Indonesia dari berbagai sumber yang tersedia *online*.

Tabel 3. Angka Aborsi per-tahun di Indonesia

Aborsi per tahun	Remaja	Tahun	Lain-lain	Sumber
2,4 juta	800 ribu	2010		
2 juta per tahun menurut				BKKBN
2,5 juta				
1 ~ 2 juta		2011		Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA
2 juta per tahun, 37 aborsi / 1000 perempuan usia reproduksi,		2000		
2 ~ 2,6 juta aborsi per tahun. 43 aborsi setiap 100 kehamilan.		2009		
2,3 juta per tahun	30% dari 2,3 juta		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) remaja 150.000 ~ 200.000 per tahun.	
2,3 juta	750.000	2004		Medical-Journal, Soetjningsih, 2004
2 juta	70000	2000		Parawansa
2,3 juta		2000		Azwar 2
2,5 juta				Nugraha BD
43 aborsi per 100 kelahiran		2001		Utomo, B
2,5 juta		2010		Maya Trisiswati Ch

Sumber: [http:// www.aborsi.org/ pic3.jpg](http://www.aborsi.org/pic3.jpg)

Dari beberapa sumber didapat informasi juga bahwa banyak kasus aborsi terjadi pada orang yang sudah berkeluarga, terutama karena anak yang tidak diinginkan (sudah banyak), jadi aborsi tidak murni terjadi karena hubungan seks luar nikah. Menurut [CIA World Factbook](#) angka kelahiran Indonesia 18.1 per 1000 penduduk. Jumlah penduduk Indonesia 240 juta, jadi jumlah kelahiran sekitar 4,344 juta. jika misal 37 aborsi per 1000, maka total aborsi 1,6 juta.

Kenyataan obyektif yang penulis uraikan secara faktual yang menimpa bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia nyaris kehilangan "jati dirinya", Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah sangat berat. Berbagai peristiwa tahun-tahun terakhir ini sungguh mengancam eksistensi bangsa, merebaknya konflik sosial dan teror kekerasan yang tak terkendali telah menghancurkan modal sosial yang begitu penting bagi keutuhan moral kehidupan bersama. Wabah korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela telah menjadikan kita sebagai bangsa yang memiliki rendahnya rasa saling percaya kepada sesama (*low trust society*).

Perkembangan teknologi dan globalisasi informasi di satu sisi memiliki nilai sangat positif. Hanya dengan satu unit PC dilengkapi modem dan hubungan telepon, setiap orang mampu mengakses

berbagai informasi dengan berbagai subyek, melintasi batas teritorial dengan biaya sangat murah, mudah, dan cepat. Tetapi, di sisi lain, dampak negatifnya pun tidak kalah besar, karena berbagai informasi maupun gambar porno dengan mudah bisa diakses untuk sekadar ditonton maupun "dinikmati". Bahkan, milis pribadi pun sering kali mendapat kiriman "liar" meskipun sudah berusaha menjaganya.

Informasi dan gambar porno belakangan menjadi marak, bahkan tabloid dan koran porno dilengkapi kolom-kolom iklan layanan seks serta nomor telepon dengan mudah ditemukan dalam setiap sudut tempat penjual koran, majalah, maupun VCD. Pornografi Cepat atau lambat akan mempengaruhi budaya bangsa kita, terutama anak-anak dan remaja yang tengah membentuk identitas diri. nampaknya budaya 'malu' dari bangsa ini telah melemah.

Berdasarkan fenomena obyektif yang dipaparkan tersebut, maka sepatutnya harus dilakukan tindakan *afirmatif* untuk melakukan revitalisasi jati diri bangsa, khususnya melalui pendidikan karakter, agar dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia; memang sudah selayaknya menjadi perhatian yang sangat khusus untuk saat ini. Mengingat kondisi bangsa Indonesia sebagai bangsa besar dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, sangat ironis bila melihat kenyataan sekarang ini. Bangsa yang sebelumnya sangat dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Bangsa-bangsa di Asia sangat hormat dan Amerika Serikat pun sangat segan terhadap bangsa kita. Sangat jauh sekali bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Untuk itu sudah saatnya harus ***merevitalisasi jati diri bangsa***.

Sudah saatnya untuk **memperkuat jati diri bangsa** Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang penuh kerukunan beragama walaupun tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki suku terbanyak. Tugas yang diemban saat ini adalah menjadi masyarakat yang patuh pada peraturan, disiplin, tertib, biasakan budaya antri, bermoral, beradab, beretika. dan menjadikan setiap langkah yang dibuat selalu bermanfaat untuk orang banyak. Bukan saling sikut, saling cemooh, fanatik pada golongan tertentu yang nota bene malah membuat bangsa kita hancur, lemah serta tidak berdaya menghadapi masalah-masalah internal sehingga kehilangan rasa hormat dari bangsa-bangsa lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter sangat signifikan untuk melakukan revitalisasi jati diri bangsa, sebagai bangsa yang besar merupakan suatu hal yang sangat fundamental untuk membangun sebuah bangsa yang maju. Hanya bangsa yang mampu membangun karakter yang kuat yang akan mampu menjadi bangsa yang berjaya.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan bahwa focus masalahnya adalah mencakup analisis verbalistik tentang pendidikan karakter, jati diri bangsa dan revitalisasi jati diri bangsa Indonesia, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter?
- b. Bagaimanakah perspektif sosiologis tentang pendidikan karakter?
- c. Bagaimanakah jati diri bangsa Indonesia?
- d. Mengapa harus dilakukan revitalisasi jati diri bangsa Indonesia?

3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Karya tulis ini disusun, untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif tentang fenomena permasalahan bangsa, sehingga dapat mengetahui hal-hal berikut:

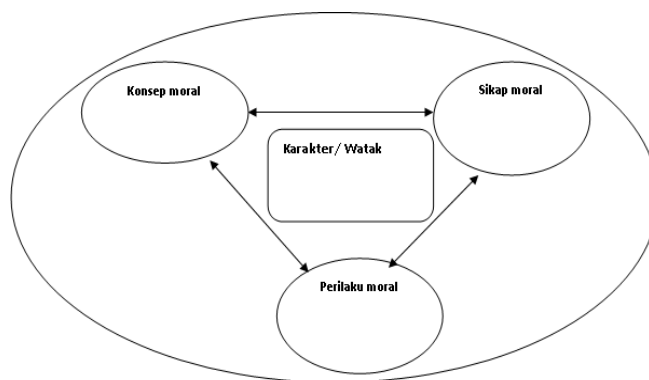
- Pengertian dan makna pendidikan karakter
- Perspektif sosiologis tentang pendidikan karakter
- Pemahaman tentang jati diri bangsa Indonesia
- Revitalisasi jati diri bangsa Indonesia

Kegunaan tulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam perspektif sosiologis serta sebagai penyegaran bagi masyarakat pembaca, agar memiliki *sense of crisis*, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam rangka revitalisasi jati diri bangsa.

4 Pendidikan Karakter

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan dibawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga aspek tersebut.



Gambar 1
Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan Karakter yang baik menurut Lickona

Selanjutnya perlu dikemukakan tentang pengertian Pendidikan Karakter Menurut Ahli sebagai berikut:

- Pendidikan Karakter Menurut Lickona: menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

- b. Pendidikan Karakter Menurut Suyanto (2009), mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.
- c. Pendidikan Karakter Menurut Kertajaya, Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu (Kertajaya, 2010).
- d. Pendidikan Karakter Menurut Kamus Psikologi. Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, 1982: p.29).

Dalam pendidikan karakter, terdapat nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan budaya dan karakter, karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti. Sumber dimaksud adalah Agama, Pancasila, budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional.

Menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka nilai yang terkandung dalam agamanya dijadikan dasar membentuk karakter bangsa. Pancasila dijadikan sumber karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila adalah dasarnya. Selain itu mengingat bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku bangsa dan beranekaragam budaya, maka adalah suatu keharusan dalam menanamkan nilai karakter bangsa berdasarkan nilai budaya yang ada tempat mereka berada. Didalam konteks pendidikan, dengan bersumber dari agama, Pancasila dan budaya maka secara teknis dirumuskan melalui tujuan nasional pendidikan.

Bangsa Indonesia mau dibentuk dalam kualitas seperti apa sangat ditentukan oleh tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu sebenarnya sumber nilai karakter bangsa yang paling teknis / operasional sifatnya adalah Tujuan Pendidikan Nasional. Karena pendidikan apapun bentuknya di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sesuai UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terdapat 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yaitu, (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) Peduli social, dan (18) Tanggung jawab.

Guna kepentingan pendidikan karakter bangsa maka secara operasional rumusan ke 18 nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- (2) Jujur ; Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- (3) Toleransi ; Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- (4) Disiplin; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- (5) Kerja Keras; Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (6) Kreatif ; Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

- (7) Mandiri; Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
- (8) Demokratis; Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- (9) Rasa Ingin Tahu; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- (10) Semangat Kebangsaan; Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- (11) Cinta Tanah Air; Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- (12) Menghargai Prestasi; Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- (13) Bersahabat/ Komunikatif; Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
- (14) Cinta Damai; Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya
- (15) Gemar Membaca; Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
- (16) Peduli Lingkungan; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- (17) Peduli Sosial; Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
- (18) Tanggung-jawab; Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi Indonesia sekarang ini, pendidikan karakter juga berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sistematis dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun dan menguatkan karakter rakyat Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan, tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, tanpa semangat berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan optimisme. Inilah tantangan kita bangsa Indonesia, sanggup?

Theodore Roosevelt mengatakan: *"To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society"* (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat).

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai *the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development* (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/ madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal).

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai *the golden rule*. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai agama dan sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sendiri, dalam rangka membina kepribadian peserta didik.

Mengacu kepada uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga siswa didik menjadi paham (ranah kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (ranah afektif) nilai yang baik, dan mau melakukannya (ranah psikomotor).

5 Perspektif Sosiologis tentang Pendidikan Karakter

Pendidikan merupakan *human investmen* (investasi manusia) yang sangat penting. Peran pendidikan sangat signifikan dalam mem-posisi-kan suatu bangsa di tengah era globalisasi saat ini. Kualitas pendidikan menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menghantarkan suatu bangsa pada modernisasi. Apabila memperhatikan kualitas pendidikan Indonesia saat ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Berdasarkan artikel Kompas (3/ 3/ 22011) dicantumkan bahwa berdasarkan data dalam *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan UNESCO, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei.

Berdasar pada informasi tersebut, maka perlu segera diupayakan peningkatan kualitas pendidikan, agar bangsa Indonesia tidak semakin tertinggal. Peningkatan mutu pendidikan perlu ditinjau dari berbagai aspek demi tercapainya sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Salah satu perspektif yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang ideal dan sesuai dengan karakter bangsa adalah perspektif sosiologi.

Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Analisis sosiologi meliputi proses interaksi sosial yang terkait dengan aktivitas pendidikan baik dari lingkup keluarga, kehidupan sosio-kultur masyarakat maupun pada tingkat nasional. Pendidikan dalam perspektif sosiologi dapat menghasilkan sebuah gambaran objektif tentang relasi-relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas pendidikan di negara Indonesia. Dengan demikian wawasan dan pengetahuan sosiologis untuk membedah tubuh pendidikan menjadi perlu untuk dibahas agar proses-proses pengajaran tidak bias ke arah yang kurang relevan dengan kebutuhan bangsa.

Sosiolog Emile Durkheim memandang pendidikan sebagai “*social thing*” atau disebut juga dengan *ikhtiar social*. Menurut Durkheim, masyarakat secara keseluruhan beserta masing-masing lingkungan social di dalamnya merupakan sumber cita-cita yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup hanya kalau terdapat tingkat homogenitas yang

memadai di kalanganarganya. Keseragaman esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya sejak dini di kalangan anak-anak. Tetapi, di balik itu, suatu kerjasama apapun tentunya tidak mungkin tanpa adanya keanekaragaman. Keanekaragaman yang penting tersebut, oleh pendidikan dijamin dengan pelaksanaan pendidikan yang beraneka ragam, baik dalam jenjang maupun spesialisasinya.

Berawal dari pandangannya bahwa pendidikan sebagai “*social thing*”, Durkheim mengungkapkan bahwa pendidikan itu bukanlah satu bentuk, dalam arti ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Seberapa banyak macam yang dimaksud, mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, akan menentukan tipe-tipe pendidikan yang diselenggarakan.

Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran social (*the individual self, and the social self, the I and the We, or homoduplex*) menjadi paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Penyelaman dan pencernaan nilai-nilai dan disiplin oleh Durkheim dianggap sebagai syarat inisiasi anak terhadap masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi tumbuh kembang masyarakat. Durkheim menggambarkan betapa generasi muda memerlukan bantuan pendidikan untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan di tengah masyarakat yang memiliki tata nilai tertentu. Persiapan itu diperlukan karena pemuda pada dasarnya belum siap memasuki kehidupan masyarakat. Sasaran pendidikan adalah mengembangkan kekuatan fisik, intelektual, dan moral yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat.

Persepsi Durkheim terhadap Pendidikan, dinyatakan sebagai satu kesatuan utuh dari masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan sebagai dasar masyarakat menentukan proses alokasi dan distribusi sumber-sumber perubahan. Pendidikan juga berfungsi sebagai “*baby-sitting*” yang bertugas agar warga masyarakat tidak ada yang memiliki perilaku menyimpang. Untuk mengemas pendidikan agar menjalankan fungsi tersebut, harus ditetapkan prioritas yang tepat. Pendidikan harus bisa memaksimalkan bakat siswa. Pendidikan juga harus didekatkan pada masyarakat luas.

Mengenai perencanaan pendidikan, Durkheim memandang pentingnya orientasi pendidikan sebagai upaya penyediaan *human capital* (modal sumber daya manusia). Pendidikan merupakan sebuah investasi. Dalam tataran pembelajaran, desain pembelajaran diatur menganut prinsip “bank konsep” dimana sekolah/ guru berperan sebagai “deposan”, sementara murid sebagai “penerima uang deposan”.

Durkheim melihat bahwa pada masing-masing masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam memilih format pendidikan. Masyarakat dan pendidikan saling berinteraksi dan saling memberikan pengaruh. Pendidikan selalu berkaitan erat dengan institusi yang lain. Pendidikan selalu ditumbuhkembangkan berdasar nilai-nilai kolektif dan keyakinan suatu masyarakat. Sehingga moralitas umum harus masuk dalam kurikulum dan guru harus memiliki komitmen untuk mentransformasikannya kepada siswa di sekolah, dengan memulai dari guru itu sendiri. Secara tegas Durkheim menyatakan bahwa suatu keharusan, dunia pendidikan melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan arus deras transformasi yang berlangsung dalam perkembangan masyarakat modern. Ia menyimpulkan, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada pendekatan sosiologi bagi para guru.

Lebih lanjut, menurut Durkheim, pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) *Memperkuat solidaritas social*
Membuat individu merasa menjadi bagian dari kelompok dan dengan demikian akan mengurangi kecenderungan untuk melanggar aturan
- 2) *Mempertahankan peranan social*
Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniature. Sekolah mempunyai hierarki, aturan, tuntutan yang sama dengan “dunia luar”. Sekolah mendidik orang muda memenuhi berbagai peranan
- 3) *Mempertahankan pembagian kerja*
Membagi-bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecakapan. Mengajar siswa untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kecakapan mereka

Perspektif sosiologi sebagai pisau bedah dalam menganalisa pendidikan sangat bermanfaat bagi perbaikan berbagai permasalahan pendidikan yang kini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Kajian dan analisis terhadap keterkaitan fenomena sosial dalam proses pendidikan penting untuk diketahui, diinformasikan dan diimplementasikan dalam pengambilan keputusan, kebijakan maupun strategi dalam praktik pendidikan terkait dengan fungsi sosiologi pendidikan yaitu menyediakan visi, pemahaman dan kemampuan terhadap proses pendidikan, dan kemampuan bekerja dalam pendidikan dengan memanfaatkan dinamika struktural dan proses sosial terkait dengan proses pendidikan, dikarenakan kehidupan sosial baik dalam maupun luar lembaga pendidikan mempunyai andil yang besar terhadap proses dan hasil-hasil pendidikan.

Sosiologi pendidikan dapat membantu memberi bahan yang berharga dalam proses pendidikan dengan berbagai masalah dan implikasi yang di timbulkan. Dalam hal ini sosiologi membantu meningkatkan kepekaan dalam melihat nilai-nilai melihat nilai-nilai, institusi, budaya, dan kecenderungan yang ada dimasyarakat. Sosiologi pendidikan juga memberi jalan kepekaan untuk melihat nilai-nilai, institusi, budaya, dan kecenderungan lainnya yang terjadi didalam dunia pendidikan. Selain itu, sosiologi pendidikan dapat membantu memahami perencanaan, proses implementasi, dan implikasi penerapan program maupun kebijakan pendidikan tertentu.

Pengembangan atau dinamika pendidikan seharusnya dilandasi konsep dan teori sosial, dengan argumentasi; pertama pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang dinamis menuju masyarakat berbasis pengetahuan itu. Kedua, praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah pesat di satu pihak, namun di lain pihak dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Dan alasan yang ketiga adalah pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologis, karena ia bukan sekedar mesin atau teknologi pembelajaran *ansich*.

Melalui bantuan perspektif sosiologis, sekolah dan guru akan dapat memahami lingkungan sosial, proses-proses sosial seperti terjadinya konflik, integrasi, pelapisan dan proses sosialisasi. Sosiologi akan membantu meningkatkan kepekaan budaya sehingga memungkinkan praktisi pendidikan mampu mengelola pembelajaran berbasis multikultural, melakukan antisipasi terhadap dampak budaya global dan arus informasi yang tanpa batas.

Perspektif sosiologis terhadap pendidikan karakter, mengacu kepada berbagai perspektif atau paradigma yang masing-masing memiliki focus spesifik dan dapat diimplementasikan terhadap masyarakat dimanapun mereka tinggal, termasuk di Indonesia, agar permasalahan bangsa dapat segera dicarikan solusinya, sehingga karakter yang dibentuk melalui pendidikan, akan memulihkan jati diri bangsa.

Dalam pendekatan sosiologis, berikut akan penulis uraikan tentang pendidikan dari (1) Perspektif Struktural Fungsional, (2) perspektif konstruksionis (3) perspektif Behavioristik, (4) perspektif Sosial Cognitive.

a. Perspektif Struktural Fungsional

Perspektif teori struktural fungsional memiliki akar pada pemikiran Emile Durkheim dan Max Weber, dua ahli sosiologi klasik yang terkenal. Sedangkan dalam perkembangan berikutnya, perspektif ini juga dipengaruhi oleh karya Talcott Parson dan Robert Merton, dua ahli sosiologi kontemporer yang terkenal pada masa kini.

Perspektif teori struktural fungsional dipandang sebagai perspektif teori yang sangat dominan dalam perkembangan sosiologi dewasa ini. Seringkali, perspektif ini disamakan dalam teori sistem, teori ekuilibrium. Konsep yang penting dalam perspektif ini adalah struktur dan fungsi, yang menunjuk pada dua atau lebih bagian atau komponen yang berbeda dan terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Struktur seringkali dianalogikan dengan organ atau bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan fungsi menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berhubungan dan bergerak. Misalnya perut adalah struktur, sedangkan pencernaan adalah fungsi. Contoh lainnya, organisasi angkatan bersenjata adalah struktur, sedangkan menjaga negara dari serangan musuh adalah fungsi. Struktur tersusun atas beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.

Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen dari masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/ lokal dan sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status (posisi yang ditentukan secara sosial, yang diperoleh baik karena kelahiran (*ascribed status*) maupun karena usaha (*achieved status*) seseorang dalam masyarakat). Jaringan dari status sosial dalam masyarakat merupakan sistem sosial, misalnya jaringan status ayah-ibu-anak menghasilkan keluarga sebagai sistem sosial, jaringan pelajar-guru-kepala sekolah-pegawai tata usaha menghasilkan sekolah sebagai sistem sosial, dan sebagainya. Setiap status memiliki aspek dinamis yang disebut dengan peran (*role*) tertentu, misalnya seorang yang berstatus ayah memiliki peran yang berbeda dengan seseorang yang berstatus anak.

Sistem sosial mengembangkan suatu fungsi tertentu yang dengan fungsi itu memungkinkan masyarakat dan bagi orang-orang yang menjadi anggota masyarakat untuk eksis. Masing-masing menjalankan suatu fungsi yang berguna untuk memelihara dan menstabilkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Misalnya lembaga pendidikan berfungsi mengajarkan pengetahuan atau ketrampilan, lembaga agama berfungsi memenuhi kebutuhan rohaniyah, keluarga berfungsi untuk sosialisasi anak dan sebagainya. Para penganut struktural fungsional mengasumsikan bahwa sistem senantiasa cenderung dalam keadaan keseimbangan atau equilibrium. Suatu sistem yang gagal dari salah satu bagian dari sistem itu mempengaruhi dan membawa akibat bagi bagian-bagian lain yang saling berhubungan satu sama lain.

Setiap sistem sosial pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu dan (2) konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu (fungsi lanjutan). Misalnya mata, fungsinya adalah melihat sesuatu dalam lingkungan. Fungsi lanjutan dari mata adalah dengan mata orang dapat belajar, bekerja dan juga dapat melihat datangnya bahaya. Dalam masyarakat, lembaga pemerintahan memiliki fungsi utama menegakkan peraturan, sedangkan fungsi lanjutannya adalah menggerakkan roda perekonomian, menarik pajak, menyediakan berbagai fasilitas sosial dan sebagainya.

Menurut pandangan Robert Merton salah satu tokoh perspektif ini, suatu sistem sosial dapat memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi yang diharapkan dan diakui, serta fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak diharapkan dan tidak diakui. Lembaga pendidikan sekolah taman kanak-kanak misalnya memiliki fungsi manifest untuk memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak sebelum ke jenjang sekolah dasar. Fungsi latennya, memberi pekerjaan bagi guru TK, membantu orang tua mengasuh anak selagi orang tuanya bekerja dan sebagainya.

Dalam pandangan Robert Merton, tidak semua hal dalam sistem selalu fungsional, artinya tidak semua hal selalu memelihara kelangsungan sistem. Beberapa hal telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam sistem, bahkan dapat saja menyebabkan rusaknya sistem. Ini oleh Merton disebut dengan disfungsi. Misalnya tingkat interaksi yang tinggi dan kaku dalam keluarga dapat menghasilkan disfungsi, antara lain dalam bentuk kekerasan dan perlakuan kasar atau penyiksaan pada anak.

Para penganut perspektif struktural fungsional ini berusaha untuk mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem dan berusaha memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan satu sama lain suatu susunan dari bagian-bagian tersebut dengan melihat fungsi manifest maupun fungsi latennya. Kemudian mereka melakukan analisis mengenai manakah yang memberi sumbangan bagi terciptanya kelestarian sistem dan manakah yang justru menyebabkan kerusakan pada sistem. Dalam hal ini dapat saja suatu komponen menjadi fungsional dalam suatu sistem, tetapi menjadi tidak fungsional bagi sistem yang lain. Misalnya ketaatan pada suatu agama merupakan sesuatu yang fungsional dalam pembinaan umat beragama, tetapi tidak fungsional bagi pengembangan persatuan berbagai etnik yang beragama agamanya.

Dalam pandangan perspektif struktural fungsional ini, suatu sistem sosial eksis karena sistem sosial itu menjalankan fungsinya yang berguna bagi masyarakat. Pusat perhatian perspektif ini juga tertuju pada masalah tatanan (*order*) dan stabilitas, yang karena perhatiannya pada hal ini mereka dikritik mempertahankan status-quo. Karena perhatiannya tertuju pada keseimbangan dan kelestarian sistem, perspektif ini juga sering dikritik mengabaikan proses perubahan yang terjadi dalam sistem sosial

b. Perspektif konstruksionis

Pendidikan yang dikembangkan berdasarkan perspektif konstruksionis tidak lepas dari pemikiran sosiologi yang dimulai oleh teoritis Jerman akhir abad 19 dan awal abad 20, terutama dari karya Simmel dan Weber. Perspektif ini beranggapan bahwa perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku obyek alam. Manusia selalu bertindak sebagai agen dengan mengkonstruksi realitas kehidupan sosial. Cara melakukan tergantung cara mereka memahami atau memberikan makna terhadap dunianya. Oleh karena itu, maka tugas sosiologi adalah memahami cara agen melakukan penafsiran, member makna terhadap realitas.

Mahasiswa yang mempelajari sosiologi pendidikan, harus mempelajari pemikiran sosiolog Amerika, seperti Simmel dan George Herbert Mead. Mereka adalah pelopor tradisi konstruksionisme. Mead adalah pelopor teori interaksionisme simbolik, sebuah pendekatan yang memanfaatkan jasa psikologi sosial, dengan mengandaikan bahwa hubungan antara aktor dibangun dalam pola-pola bahasa komunikasi. Komunikasi merupakan medium yang dipakai masyarakat untuk memahami aktor. Aktor memahami realitas melalui simbol-simbol yang

mereka gunakan dalam interaksi. Bahasa adalah simbol yang paling banyak dipakai dalam interaksi individu-individu dengan individu lainnya.

Di Eropa, tradisi konstruksionisme memunculkan sosiologi fenomenologis. Sosiologi fenomenologi memfokuskan kajiannya kepada cara-cara yang dilakukan aktor dalam memahami dan menafsirkan dunia sosial dengan memperhatikan pencerapan data (*sense data*) kedalam tipifikasi atau penggambaran secara mental. Cara-cara individu melakukan tipifikasi dengan menghubungkan pemahaman secara intersubyektif, disamping juga menghubungkan antara penggambaran yang dibuat sosiolog dengan penggambaran yang dibuat aktor.

Sementara itu, di amerika muncul tradisi yang disebut perspektif etnometodologi. Tradisi ini beranggapan bahwa tidak mungkin melakukan penggambaran dunia sosial secara ilmiah. Oleh karena itu cara melakukan penggambaran yang paling mungkin dilakukan sosiolog satu-satunya adalah melakukan penggambaran sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sang aktor.

Dalam pertimbangan sosiologi kontemporer, tradisi konstruksionis memicu munculnya teori strukturasi. Teori strukturasi mencoba memperlihatkan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat hubungan antara tindakan pemahaman atau penafsiran dengan munculnya sistem sosial yang stabil yang berkembang diluar individu dalam skala yang luas. Setiap tindakan individu tersebut adalah dalam rangka mewujudkan tujuan atau keinginan personal.

Dari perkembangan tradisi konstruksionis tersebut, memberi inspirasi kepada para pemikir pendidikan. Sosiologi pendidikan yang mendasarkan pada perspektif konstruktivisme dalam hal ini memfokuskan pada “pemahaman siswa” (*student's understanding*). Pendidikan harus dimulai dari pemahaman siswa tersebut dan pemahaman siswa harus menjadi focus perhatian guru.

Tugas praktisi pendidikan dengan demikian adalah memahami faktor-faktor instrinsik yang ada dalam diri siswa. Oleh karena itu pendidikan harus dimulai dari *self concept* siswa. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan kondusif bukan semata tugas guru tetapi siswa juga dinilai memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Dalam pendidikan konstruktivistik, pembelajaran dipandang sebagai proses yang dikendalikan sendiri oleh siswa. Perspektif ini menekankan kepada proses pembelajaran kolaboratif, sehingga proses pembelajarannya dilakukan bersama. Siswa diberi fasilitas untuk berinteraksi dengan lingkungannya disertai dengan proses refleksi diri. Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan konstruktivistik menegaskan bahwa sumber belajar bukan hanya bersumber dari guru, melainkan juga dari kawan sepergaulan dan orang-orang disekitarnya.

Paradigma konstruktivisme mengembangkan inisiatif dan kreatifitas pemikiran individu dalam pembelajaran. Dalam pendidikan konstruktivistik, anak-anak atau siswa belajar dengan mengembangkan struktur kognitifnya yang kompleks, mengembangkan skema-skema berfikir, terutama menggunakan informasi dan pengetahuan baru untuk meraih kemajuan. Siswa belajar berinteraksi dengan lingkungannya.

Dengan demikian, pembelajaran dalam paradigma konstruktivistik menjadikan siswa aktif dan menentukan apa yang harus dipikirkan dan dipelajari. Fokusnya dalam hal ini diarahkan kepada cara bagaimana siswa mengkonstruksi makna tentang kehidupan dan dunianya. Dalam pemikiran konstruktivisme, muncul dua aliran, yaitu:

- 1) **Konstruktivisme psikologis**
Pendidikan difokuskan kepada siswa sebagai individu dan bagaimana mereka mengkonstruksi pengetahuan, keyakinan dan identitasnya sendiri selama proses pembelajaran. Penganut perspektif ini antara lain adalah Piaget, yang melahirkan teori perkembangan kognitif (kemajuan individu melalui serangkaian tahapan).
- 2) **Konstruktivisme sosial**
Pendidikan difokuskan kepada peran faktor sosial dan budaya dalam pengembangan pembelajaran. Perspektif ini meyakini bahwa proses sosial merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Ahli pendidikan Vigotsky yang selalu dikaitkan dengan teori ini menganjurkan penggunaan secara lebih kreatif strategi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif.

Ada beberapa tokoh utama dalam tradisi konstruksionis, mulai dari Weber, Berger, hingga Giddens. Berikut adalah ulasan dari tokoh-tokoh tersebut.

- 1) **Max Weber**
Max Weber merupakan ilmuwan sosial yang sangat berpengaruh, lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, ayahnya seorang pejabat dan ibunya seorang Calvinis. Pada mulanya ia mengikuti gaya hidup ayahnya, tetapi kemudian tumbuh antipati dan ia memilih dekat dengan gaya hidup ibunya. Weber tercatat sebagai pendiri masyarakat sosiologi Jerman pada tahun 1910. Ia mengkaji tindakan individu dalam membangun teori sosiologi. Ia melihat individu yang berpengaruh di masyarakat, tetapi dengan catatan bahwa tindakan sosial individu ini berhubungan dengan rasionalitas, apakah rasionalitas instrumental atau rasionalitas yang berorientasi nilai.
Rasionalitas instrumental akan melibatkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dan berhubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Rasionalitas nilai lebih menekankan bahwa tindakan dikendalikan oleh kesadaran akan keyakinan dan komitmen terhadap tatanan nilai yang luhur. Jadi dengan demikian, alat hanya merupakan pertimbangan dan pengukuran yang sadar, tujuan-tujuannya hanya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai-nilai akhir baginya. Pola rasionalitas demikian tidak hanya berlaku secara individu, tetapi juga meluas ke dalam masyarakat.
- (a) **Max Weber Tentang Kapitalisme**
Weber menuangkan pemikirannya tentang kapitalisme dalam *the protestan ethic and the spirit of capitalism* (1958). Masyarakat kapitalisme menurut Weber, memandang manusia terutama sebagai pekerja. Ia mencirikan kapitalisme seperti:
 - (1) Adanya usaha-usaha ekonomi yang diorganisir dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan serta berkembangnya kepemilikan pribadi;
 - (2) Berkembangnya produksi untuk pasar;
 - (3) Produksi untuk massa dan melalui massa;
 - (4) Produksi untuk uang; dan
 - (5) Adanya antusiasme, etos dan efisiensi yang maksimal yang menuntut pengabdian manusia kepada panggilan kerja.Weber melihat ada hal diluar ekonomi yang mempengaruhi terbentuknya kapitalisme, yaitu agama protestan. Agama protestan mengajarkan bahwa bekerja keras merupakan panggilan suci bagi kehidupan manusia. Berlaku hemat dengan cara menggunakan hasil kerjanya tidak untuk bersenang-senang maupun untuk upacara keagamaan. Weber melihat kapitalisme sebagai suatu perubahan tatanan

moral yang lama, yang menekankan pada pamrih material dan pendobrakan nilai-nilai karya tradisional.

(b) Max Weber Tentang Stratifikasi Sosial

Weber menggunakan konsep kelas dan kelas pluralistik dalam menjelaskan stratifikasi sosial. Kelas adalah golongan orang dalam kontinum status dan situasi yang sama, yaitu kesempatan untuk memperoleh barang dan untuk dapat menentukan sendiri keadaan kehidupan eksternal dan nasib pribadi. Kelas pluralistik membicarakan tentang “situasi golongan status”, artinya diberikan hak istimewa positif atau negatif. Status ini diberikan dalam hubungannya dengan martabat sosial. Dituntut secara efektif dalam gaya hidup yang spesifik. Situasi golongan status dapat berdasarkan atas situasi kelas dan hal sebaliknya pun juga bisa terjadi, yaitu status menentukan kelas.

(c) Max Weber Tentang Kelas dan Kekuasaan

Weber menaruh perhatian bagaimana kelompok dan kepentingan kelompok muncul dalam kehidupan sosial. Persaingan dipengaruhi oleh kekuasaan, yang mana kekuasaan tersebut menentukan satu kelompok mendominasi kelompok sosial yang lain. Kekuasaan tersebut meliputi dimensi kelas, status, dan partai. Kelas mengacu kepada tatanan ekonomi masyarakat yang dalam hal ini “hubungan pasar” (berkaitan dengan kepemilikan individu) merupakan suatu hal yang utama. Status mengacu kepada cara organisasi masyarakat memunculkan perbedaan lantaran prestise atau kehormatan bagi kelompok individu yang berbeda-beda. Kehormatan atau status sosial bersumber dari gaya hidup yang dipakai oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti ritual dan perkawinan. Partai adalah cara kelompok mengorganisir diri dalam mencapai tujuan hidup. Partai bisa dibentuk atas dasar kelas maupun kelompok status atau gabungan dari keduanya.

Partai berusaha meraih posisi, kehormatan dan kontrol atas tatanan sosial. Mereka juga mencari keabsahan atau legitimasi di mata kelompok yang dikuasai. Ada tiga sumber legitimasi, yaitu tradisi, kharisma, dan instrumen rasional.

(d) Kontribusi Weber terhadap sosiologi pendidikan

Pemikiran Weber memberi inspirasi untuk melihat pendidikan tidak dari aspek struktural, institusi ataupun sistem, melainkan dari sudut pemahaman dan pemaknaan individu tentang pendidikan. Dalam hal ini Weber tetap memberi perhatian terhadap struktural makro. Teori yang ditawarkan tentang organisasi birokrasi rasional juga menginspirasi bagaimana dunia pendidikan mengorganisir diri. Birokrasi yang dimaksud adalah birokrasi modern yang ditandai dengan kepemimpinan yang didasarkan kepada legitimasi legal rasional.

Pendidikan menurut Weber harus mengajarkan “budaya status” tertentu. Hubungan kekuasaan dan konflik kepentingan selalu muncul di masyarakat dan mempengaruhi kondisi di sekolah. Pada umumnya yang terjadi ialah kelompok budaya dominan juga yang membentuk budaya yang berlaku di sekolah.

Weber pernah menulis *the rationalization of education and training*, yang didalamnya ia menyatakan bahwa pendidikan yang rasional melahirkan tipe “manusia spesialis”, berbeda dengan manusia terlatih yang dilahirkan pendidikan berorientasi *vocational*. Di masyarakat pra industri pendidikan menjadi faktor penting dalam menyiapkan agen perubahan yang terdidik untuk menduduki posisi penting dalam mendorong pertumbuhan masyarakat. Di masyarakat industri, pendidikan memperoleh *pressure* dari kelas menengah yang bekerja keras merebut posisi dalam sistem ekonomi yang terus berubah.

Menurut Weber ada dua tipe manusia di sekolah, yaitu *insider* dan *outsider*. *Insider* adalah mereka yang memiliki status budaya yang diperoleh dari tata nilai dan

berbagai proses pengalaman di sekolah. *Outsider* adalah mereka yang memiliki banyak kendala untuk bisa menjadi manusia berhasil di sekolah.

2) Edmund Husserl dan Alfred Schutz

Ada pemikiran lain yang mencoba menghubungkan antara individu dan struktur ini. Pemikiran ini didasari oleh filsafat aliran Fenomenologi ini di latarbelakangi oleh pemikiran Edmund Husserl dan Alfred Schutz. Menurut Husserl, pengetahuan ilmiah sebenarnya terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dari kegiatan-kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan berakar. Fenomenologi sebagai suatu bentuk dari idealisme yang semata-mata tertarik pada cara-cara bekerjanya kesadaran manusia beserta dasar-dasarnya. Dunia yang didiami menurut perspektif ini diciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang ada di kepala masing-masing, namun tidak berarti dunia yang eksternal itu tidak ada. Dunia eksternal itu ada, dan hanya dapat dimengerti melalui kesadaran manusia tentang dunia itu.

Proses bagaimana manusia membangun dunianya dijelaskan oleh Alfred Schutz melalui proses pemaknaan. Proses pemaknaan itu berawal dari arus pengalaman yang berkesinambungan yang diterima oleh panca indera. Pengidentifikasian dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna inilah yang terjadi di dalam kesadaran individu secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran.

Schutz menganggap cara berfikir Weber sudah benar, akan tetapi ada beberapa aspek yang problematik. Pertama ia mempersoalkan ide Weber yang mempersoalkan ide Weber yang menyatakan bahwa makna tindakan adalah identik dengan *motive* tindakan. Dalam hal ini semua tindakan memiliki makna, baik tindakan rasional dan irasional.

Dari pemikiran yang tergambar di muka lalu muncul tradisi Interaksionisme Simbolik. Tradisi ini, menurut salah satu pelopornya, Herbert Blumer bertumpu pada tiga premis utama, yaitu (1) manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang ada pada sesuatu bagi mereka. (2) Makna tersebut berasal dan hasil interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (3) Makna-makna tersebut disempurnakan dan dimodifikasi melalui proses penafsiran di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Implikasi dari ketiga premis tersebut, maka tindakan manusia bukan disebabkan oleh “kekuatan luar” tetapi juga bukan karena “kekuatan dalam”. Individu dalam hal ini yang benar adalah membentuk objek-objek yang berbeda, memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut.

Oleh karena itu individu senantiasa berupaya mengantisipasi tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan orang lain. Proses inilah yang dinamakan Blumer sebagai *self-indication*. Sosiologi pendidikan mengikuti perspektif ini kemudian menyarankan agar para pendidik memahami siswa sebagai individu yang aktif yang memiliki kesadaran, selalu merancang tindakannya dan selalu melakukan refleksi.

3) Mead dan Cooley

Dapat dipahami dari pemikiran Mead dan Cooley bahwa individu memiliki berbagai pengalaman budaya. Mereka menggunakan berbagai pengalaman, pengharapan, sentimen, dan rasionalitas yang dimilikinya itu guna menafsirkan dan mendefinisikan berbagai situasi sosial. Mereka melakukan penafsiran dengan cara yang sama ketika ada kesamaan pengalaman sosialisasi dan ekspektasi. Namun di lain pihak terjadi perbedaan karena pengalaman, status sosial dan kelas sosial individu satu sama lain tidak sama. Atas dasar asumsi itu maka sosiologi (pendidikan) harus memberi perhatian kepada interaksi sosial, baik di masyarakat, di pendidikan sekolah maupun dalam situasi-situasi lainnya.

4) Goffman

Goffman memandang perilaku manusia sebagai seni teater, yang tidak bisa diukur secara kuantitatif, menggunakan alat-alat statistik. Semua manusia memainkan peran, baik peran diatas panggung maupun di balik panggung. Ketika di atas panggung manusia cenderung memanipulasi penampilannya agar membuahkan reaksi positif dari orang lain, ketika di balik panggung ia bertindak sebagai dirinya sendiri. Dengan demikian sosiologi pendidikan bertugas membantu memahami bagaimana individu bertindak dalam relasinya dengan pihak-pihak lain di sekolah.

5) Berger dan Luckman

Selanjutnya sosiolog Berger dan Luckman menjelaskan bahwa makna-makna umum yang dimiliki bersama dan diterima tetap dilihat sebagai dasar dari organisasi sosial, namun makna yang berkembang di luar makna-makna umum merupakan hasil manusia yang muncul dari lingkungan sosial yang diciptakannya. Berger mengingatkan agar pendapat, ide dan persepsi personal tidak ikut mewarnai ketika mencoba memahami realitas yang ada dihadapannya.

Pemikiran itu dikemukakannya karena selama ini ia menganggap banyak orang telah terjebak menjadi korban dari masyarakatnya. Mereka dilahirkan di sebuah masyarakat, dan kemudian terpenjara dan dikendalikan oleh masyarakat itu. Jadi manusia ini adalah individu yang dipenjarakan oleh epoch sejarah di mana tempat ia dilahirkan, seseorang adalah anak dari budaya masyarakatnya. Seseorang tumbuh berkembang, berbahasa, berperilaku, menggagas, memperoleh pengetahuan, pemahaman serta persepsi yang kita peroleh dari budaya sekitar masyarakat. Namun sebagai individu, orang tidak hanya tinggal diam, dan hanya memberikan konformasi, tetapi juga mengelola.

Dalam perspektif Konstruksionisme, pendidikan memiliki makna berikut:

1. Makna dan *Self-Concept*

Kehidupan sehari-hari yang ada di sekolah ataupun masyarakat, merupakan konstruk individu yang berada didalamnya. Konstruk atau cara individu mempersepsikan, memaknai dan mendefinisikan kehidupan sehari-hari itulah yang akan membentuk format kehidupan nyata. Dalam kacamata sosiologi, pendidikan yang menganut perspektif konstruksionis, proses pendidikan hanya dapat dipahami dengan cara menelusuri dunia subjektif, dunia makna dan *self concept* individu yang ada dalam dunia pendidikan itu sendiri. Contoh dalam memahami sistem evaluasi pendidikan yang mengutamakan tes kognitif seperti ujian nasional. Ada individu yang mengartikan bahwa tes kognitif sangat penting, karena merupakan cara praktis dan efisien untuk mengukur tingkat kecerdasan siswa dalam jumlah yang banyak. Namun ada juga yang menilai bahwa *system test* seperti itu tidak dapat mengukur seluruh kecerdasan siswa dan hanya mengukur kecerdasan kognitif saja. Perbedaan konstruk, *self concept* dan pemaknaan terhadap penyelenggaraan tes tersebut bisa ditelusuri dari latar belakang individu.

Dalam kehidupan masyarakat, kemampuan individu mengkonstruksi, mengkonsepsikan dan memaknai penting perannya dalam mempengaruhi pendidikan. Cara memaknai dunia di sekitarnya yaitu dilakukan sejalan dengan interaksi yang dilakukan dengan aktor pendidikan yang lain. Misalnya, siswa mempersepsikan gurunya hari itu akan menyampaikan pelajaran di kelas dengan santai seperti biasa yang dilakukan. Namun dalam kenyataan pada hari itu, guru mengajar dengan sangat serius. Dengan demikian respon siswa tidak seperti biasanya yang santai, tetapi juga berubah menjadi lebih serius.

Sosiologi pendidikan menganut perspektif konstruksionis, tidak seperti penganut structural fungsional yang menekankan peran sosial. Dalam dunia pendidikan masing-masing jabatan bahkan masing-masing individu memiliki peran dan fungsinya. Meskipun statusnya sama-sama guru misalnya, setiap guru memiliki caranya sendiri dalam mengkonsepsikan, mengkonstruksi perannya di sekolah, di depan kelas, atau ketika diluar tugas-tugas pokoknya. Begitu juga siswa, masing-masing mereka memiliki persepsi, konstruksikan dan pemaknaan sendiri.

Dengan demikian, pembelajaran menurut sosiologi pendidikan yang mengambil perspektif konstruksionis harus dilakukan berdasarkan *self-concept*, atau pemaknaan yang diberikan oleh masing-masing actor yang ada dalam proses pendidikan itu. *Self-concept* mereka itu berakar pada sub kultur, bangunan pengalaman, model pengetahuan, pengharapan, bayangan-bayangan dan konsep-konsep ideal yang mereka miliki. Sosiologi pendidikanlah yang memahami dan menelusuri akar dari *self-concept* tersebut.

2. Dibangun Melalui Hubungan Intersubjektif

Dalam perspektif konstruktivisme, pengetahuan siswa adalah produk interaksi mereka dengan dunianya. Salah satunya adalah hasil interaksi dengan guru. Guru dalam menjalankan interaksi dengan siswa, selalu berangkat dari cara mereka melabeling siswanya. Label itu diberikan berdasarkan konstruksikan, konsep dan pemaknaannya terhadap perilaku dan sifat-sifat siswanya. Dengan label itu guru menentukan tindakan tertentu dalam proses pembelajaran. Misalnya, tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang diberi label rajin berbeda dengan tindakan yang diberikan guru terhadap murid yang diberi label yang tidak rajin. Dengan kata lain, tindakan guru ditentukan oleh labeling, konsepsi atau konstruksinya terhadap siswanya.

Labeling bisa jadi mempengaruhi cara siswa merespon tindakan-tindakan gurunya. Namun yang perlu di garis bawahi bahwa, tindakan guru dan siswa selalu bersifat intersubjektif. Artinya, guru maupun siswa masing-masing memonitor cara masing-masing mempersepsikan situasi di ruang dan waktu dimana interaksi mereka lakukan. Dalam proses interaksi itulah masing-masing mendefinisikan dunianya, yang dari hasil definisinya itu lalu masing-masing menentukan tindakannya. Oleh karena itu, pendidikan lalu dikonsepsi sebagai pendefinisian realitas. Dengan demikian proses pembelajaran di sekolah atau dalam institusi pendidikan manapun harus dijaga interaksi antar anggota institusi tersebut, karena memang interaksi adalah inti dari proses pendidikan.

Kelas lalu dipersepsikan sebagai tempat pengembangan dan transformasi diri (*self transformation and concept*). Dengan demikian, kesamaan hak memperoleh peluang dan perlakuan dalam kelas harus menjadi focus dalam penyusunan strategi kebijakan pendidikan. Pada tahap perencanaan, perspektif ini menganjurkan agar dilakukan pelatihan guru. Perspektif ini menganjurkan pula agar perencanaan pendidikan memfokuskan pada identitas diri siswa yakni rumusan identitas yang positif yang berguna bagi pembangunan kepercayaan diri.

Pendekatan konstruktivistik juga mengimplikasikan pilihan strategi pengelolaan kelas yang spesifik. Pertama, pembelajaran harus diarahkan kepada pengalaman dan aktifitas yang berpusat pada siswa (*learner-centered experiences and activities*) dengan menerapkan pendekatan *discovery learning* dan pemecahan masalah. Pendekatan konstruktivistik juga lebih banyak mendorong guru memberi kesempatan siswa belajar dan melakukan aktifitas bersama. Oleh karena itu pendekatan pembelajaran *cooperative learning*, *collaborative learning* dan *peer-assisted learning* merupakan pendekatan yang dianjurkan. Dalam konteks ini, maka tugas guru adalah menyiapkan pedoman kelompok yang fair.

Pendekatan konstruktivistik sangat peduli dalam menghantarkan siswa yang baru memulai belajar untuk mengetahui tujuan belajar. Pendekatan *cognitive apprenticeships* dalam hal

ini dapat memberikan bimbingan untuk memulai belajar dan mendorong mereka nantinya belajar secara mandiri.

Pendekatan *receptional learning* juga dianjurkan untuk digunakan dengan mengkombinasikan pembelajaran kolaboratif dengan petunjuk guru dan model belajar secara otonom. Oleh karena itu dorong interaksi positif antara guru dan siswa dalam satu hubungan *partnership* yang baik. Luangkan waktu untuk dialog, mendengar dan member respon pada siswa.

c. Perspektif Behavioristik

Perspektif behavioristik sering disebut dengan paradigma klasik yang muncul pada tahun 1930-an. Paradigma ini di pelopori oleh Pavlov (1849-1936), Wason (1878-1958), Skinner dan Thorndike (1874-1949). Perspektif behavioristik atau perilaku social ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk pengembangan manajemen pendidikan yang mendasarkan pada pemikiran positivisme, empirisme, teknokrasi dan manajerialisme.

Paradigma ini menganut perspektif *gestalt* yang memfokuskan pada cara kerja pemikiran kognitif, namun Pavlov menganggap perspektif tersebut memiliki kekurangan karena tidak memfokuskan langsung pada gerakan tubuh dan gejala internal tubuh yang bias diamati, Pavlov (1849-1936) menunjukan hubungan yang simple antara stimulus dan respon dalam pengajaran (*conditioning*) untuk membentuk perilaku organisme.

Watson (1878-1931) yang memperkenalkan istilah behaviorisme mengembangkan gagasannya berdasarkan apa yang dirintis Pavlov. Ia mengembangkan Pembelajaran adalah proses pembentukan kondisi yang diwujudkan dalam bentuk substitusi satu stimulus terhadap yang lain. Ia juga mengasumsikan cara berpikir manusia bersifat mekanis bukannya proses kerja mental.

Thorndike (1874-1949) memberikan sumbangan paradigma behavioristik dengan mengeksplorasi dampak perilaku terhadap perilaku tertentu lainnya yang disebut *Law of Effect*. *Law of Effect* ini mengatakan bahwa respon kuat akan diberikan apabila situasi dibuat menyenangkan, tetapi respon lemah jika situasi tidak menyenangkan. Menurut teori ini lingkungan pembelajaran merupakan factor yang amat menentukan.

Perspektif behavioristik ini menilai bahwa keseluruhan kenyataan tidak bisa dibiarkan dalam keadaan rumit dan kompleks. Sehingga dalam proses pembelajaran harus ada penyederhanaan. Paradigma ini tidak menempatkan segala sesuatu pikiran, intelegensia, ego dan berbagai bentuk rasa perorangan yang tak dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang diperhitungkan.

Pemikiran diatas menimbulkan implikasi berbagai factor pembelajaran yaitu:

- 1) Implikasi terhadap peran guru dalam pembelajaran.
- 2) Implikasin terhadap pengembangan kurikulum
- 3) Implikasi terhadap peran siswa dalam organisasi pembelajaran
- 4) Implikasi terhadap cara penilaian

Guna menerapkan paradigma behavioristik yang juga disebut sebagai perspektif *Skinnerian* guru harus merumuskan tujuan pembelajaran tertentu dalam kerangka pembelajaran behavioristik kemudian menyusun tahapan pembelajaran tersebut sehingga dapat sampai pada tujuan. Sementara siswa ditempatkan pada situasi yang kondusif untuk mencapai pembentukan perilaku tertentu. Jadi guru harus bias menciptakan situasi (*operant*) yang bersifat fisik untuk

menstimulasi pembelajaran siswa. Situasi ini adalah sebuah alat yang berupa materi dan dorongan yang bersifat eksternal.

Untuk menjalankan paradigma Skinnerian guru memerlukan sejumlah kompetensi yang harus dikuasai yaitu:

- 1) Mengetahui perilaku siswa secara tepat dan mendorong disiplin diri siswa.
- 2) Menggunakan pendekatan yang dapat memecahkan perilaku yang tidak diinginkan.
- 3) Menggunakan berbagai bentuk strategi mengelola perilaku seperti peraturan negosiasi, penggunaan sanksi yang efektif.
- 4) Mengembangkan kegiatan rutin yang jelas dalam mengelola perilaku siswa konsisten dengan peraturan sekolah.
- 5) Melakukan tindakan yang tepat, tegas, adil, dan konsisten.

Selain itu guru juga harus memiliki kemampuan membuat perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Menghubungkan program pembelajaran dengan tujuan dan sasaran pendidikan.
- 2) Menyusun tujuan yang jelas dalam program pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran siswa sebagaimana telah yang disepakati sebelumnya.
- 3) Pilih dan buat tahapan aktifitas belajar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- 4) Perhatikan tujuan siswa dan segala capaian yang telah diraih oleh siswa sebelumnya.
- 5) Susun strategi pembelajaran behavioristik dengan berupaya mengembangkan pembelajaran, tahap demi tahap, serta jamin tersedia.
- 6) Hubungkan proses penilaian atau evaluasi dengan strategi, tujuan, isi, dan tugas pembelajaran.

d. Perspektif Sosial Cognitive

Perspektif Sosial Cognitive ini muncul dari perpaduan kedua paradigma behavioristik dan konstruktivistik yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh Bredo (1997) yang pada dasarnya asumsi dibangun berdasarkan prinsip bahwa individu selalu berdialog dengan lingkungannya. Individu bukan sekedar aktor yang memproduksi apa yang dia peroleh dari dunia atau struktur di sekitarnya.

Dalam paradigma *social cognitive*, pembelajaran diatur sedemikian rupa sehingga siswa menggunakan sistem pengetahuan yang dimilikinya dan digunakan untuk berdialog dengan lingkungannya. Dan di dalam sistem ini adalah bahwa pembelajaran adalah aktifitas yang difasilitasi yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk ragam budaya guna mempermudah dalam pembelajaran, seperti halnya buku, pensil, papan, alat-alat, namun juga bisa berupa alat simbolik seperti bahasa.

Dengan demikian pembelajaran dalam perspektif ini tidak lain diartikan sebagai aktifitas sosial dan kolaborasi. Di dalam aktifitas dan kolaborasi itu siswa mengembangkan pemikirannya bersama-sama. Pembelajaran dilakukan secara partisipatoris. Apa yang dipelajari bukan hanya yang dimiliki oleh individu namun sesuatu yang dapat dibagikan dengan orang lain, dan oleh karena itu paradigma ini juga disebut dengan '*distributed cognition*', pemikiran yang terbagikan.

Perspektif *social cognitive* dirinci dengan baik oleh McInerney dan McInerney yang dapat dilihat dari cara menyampaikan materi, metodologi, motivasi dan perumusan tujuan dan cara evaluasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi
 - a. Melakukan display model, misalkan guru melakukan demonstrasi, audiovisual, mengundang tamu, dan materi harus relevan dan dapat menarik perhatian siswa.
 - b. Berfokus pada siswa, yaitu materi disampaikan dengan cara yang dapat menarik minat siswa secara langsung.
2. Aktivitas/ Metodologi
 - a. Terinci atau bertahap mengikuti model
 - b. Penjelasan dan pemberian informasi verbal
 - c. Bahan disusun secara teratur dan menarik siswa
3. Memberikan siswa untuk memahami dan menyajikan kembali materi pelajaran
 - a. Motivasi dan Tujuan
 - b. Membuat instrument reinforcement
 - c. Menekankan dorongan intrinsic maupun reinforcement
 - d. Menguasai perilaku yang ditentukan dan menstranformasikanya dalam situasi baru.
4. Evaluasi
 - a. Melakukan evaluasi formative secara terus menerus melakukan koreksi dan memberi respon terhadap umpan balik secara langsung.
 - b. Memperoduksi pendorong kepuasan yang diperlukan untuk membentuk perilaku.
 - c. Menggunakan skill yang diperlukan dalam situasi yang sama maupun yang baru melalui transformasi.
 - d. Kawan sebaya dan interaksi efektif dengan orang yang lebih dewasa.

Praktik di kelas selanjutnya menyusun strategi pembelajaran yang menurut Krause (2006: 184-187) ada tiga strategi:

- a. Mendorong pembelajaran terpusat pada pengalaman dan kegiatan siswa
- b. Memberikan kesempatan siswa belajar bekerjasama
- c. Bantu siswa baru mengembangkan keahliannya.

Dengan demikian perspektif *Social Cognitive* tampak lebih *comprehensive* dan lebih memadai jika diterapkan untuk megembangkan dan meningkatkan performance pembelajaran di Madrasah. Persoalanya sering kali bukan soal kemampuan, tetapi soal kecenderungan dan pilhan. Jika pilihan benar dalam menetapkan paradigma pendidikan, maka akan bisa menentukan strategi pembelajaran yang bisa menjamin melahirkan *outcome* pendidikan yang berkarakter, berguna dan bermanfaat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, kini maupun masa yang akan datang.

6 Jati Diri Bangsa

Jati diri dalam bahasa Inggris disebut *identity* adalah *suatu kualitas yang menentukan suatu individu atau entitas sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lain*. Kualitas yang menggambarkan suatu jatidiri bersifat unik, khas, mencerminkan pribadi individu atau entitas dimaksud. Jatidiri merupakan pencerminan individu atau suatu entitas yang mempribadi dalam diri individu atau entitas, selalu nampak dengan konsisten dalam sikap dan perilaku individu atau entitas yang bersangkutan dalam menghadapi setiap permasalahan.

Terdapat pula pihak yang membedakan antara pengertian **identitas diri** dan **jati diri**. **Identitas diri** lebih menggambarkan penampilan lahiriah dalam bentuk sikap dan perilaku yang membaku dan pribadi seperti ramah, pemarah, *introvert*, *extravert*, optimistik, pesimistik, dan sebagainya. Sedangkan jati diri adalah kualitas yang menggambarkan integritas individu atau suatu entitas,

sebagai karunia Tuhan, yang mencerminkan harkat dan martabat individu atau entitas dimaksud secara utuh.

Jatidiri mengandung nilai-nilai dasar yang akan memberikan corak terhadap jatidiri bagi pendukungnya. Jatidiri suatu bangsa yang menganut paham individualistik liberalistik akan berbeda dengan jatidiri suatu bangsa yang menganut paham kolektivistik, sosialisitik atau kegotong royongan.

Jatidiri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni **Pancasila**, yang merupakan pengejawantahan dari konsep **religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereignty dan sosialitas**. Membangun jatidiri bangsa Indonesia berarti membangun jatidiri setiap manusia Indonesia, yang tiada lain adalah membangun **Manusia Pancasila**.

Pancasila sebagai Jati diri bangsa Indonesia, sehingga ciri khas atau karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa yang lain. Jati diri bangsa merupakan suatu pilihan, dan Jati diri Bangsa Indonesia merupakan pencerminan atau tampilan dari karakter Bangsa Indonesia. Karakter bangsa merupakan akumulasi atau sinergi dari karakter individu anak bangsa yang mengelompok menjadi bangsa Indonesia. Dengan demikian karakter bangsa akan ditampilkan sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari kehidupan nyata dan dirumuskan dalam suatu tata nilai yang dikenal sebagai Pancasila.

Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang belum tergantikan hingga saat ini. Di dalamnya banyak nilai-nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa. Bila pemerintah dan masyarakat ingin mengembalikan jati diri bangsa, Maka sebaiknya bangsa ini harus bisa menghayati makna dari semua sila Pancasila, karena memang Pancasila adalah acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bila dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan rumusan nilai nilai idealisme bangsa yang secara konseptual memberikan tuntunan politik bagi rakyat dan pemerintah tentang bagaimana menemukan pemecahan persoalan negara secara mandiri dan bermartabat.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Pancasila dan Jati diri tidak dapat dipisahkan dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai landasan idiil, landasan filosofis bangsa, sumber dari segala hukum di negeri Indonesia ini, sedangkan jati diri adalah implementasi sehari-hari, sebagai perilaku insan Indonesia, seperti dengan jelas diuraikan pada tiap-tiap sila yang ada pada Pancasila:

1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Sebagai wujud Jati diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis. Jati Diri ini jelas bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis serta jelas artinya dan jelas konsekuensinya, jelas bentuknya. Sebagai bangsa yang Agamis, bangsa yang beragama, bangsa yang percaya akan adanya Tuhan, bangsa yang beriman. Maka jelas bahwa Indonesia memang

bukan murni negara sekuler. Indonesia menjadi negara yang sangat ideal dalam kerukunan antar umat beragama karena memiliki satu falsafah hidup bernegara, yaitu Pancasila.

Negara-negara Muslim lainnya tidak mempunyai model seperti Indonesia. Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara; 6 agama resmi negara; kedudukan warga negara tidak ditentukan oleh agama; hukum nasional yang berlaku. Dari perbandingan sebatas ini tampak bahwa Indonesia merupakan model negara Muslim yang baik dalam kerukunan hidup antar umat beragama.

Potensi dan modal yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama harus dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat. Disinilah letaknya jati diri bangsa dengan konsep **religiositas**.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Wujud Jati diri dari sila kedua Pancasila bahwa bangsa Indonesia adalah Bangsa yang menghormati Hak Azasi Manusia. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum kekuasaan negara/ pemerintah dilaksanakan sesuai dengan dasar dan prinsip keadilan, sehingga terikat pada undang-undang (*rule of law*). Prinsip negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan ada jaminan atas hak asasi manusia untuk rakyatnya. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia, oleh karenanya merupakan landasan idiil bagi sistem pemerintahan dan landasan etis-moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung secara tersirat maupun yang tersurat tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai penegakkan HAM. Bahkan apabila dicermati secara filosofis terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rumusan dasar tentang inti etika politik. Karena apabila orang Indonesia memiliki sikap adil dan beradab, diharapkan akan mampu bersikap adil, toleran dan menghargai hak-hak orang lain. Inilah pengakuan Pancasila terhadap nilai-nilai HAM secara hakiki, karena itulah dalam sila ini terkandung jati diri dengan konsep humanitas.

3. Persatuan Indonesia

Sebagai wujud Jati diri sila ketiga adalah Bangsa yang cinta Tanah Air. Rasa cinta tanah air atau nasionalisme dimaksudkan dalam hal ini adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan. rasa cinta tanah air perlu ditumbuhkan kembangkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Semua itu menunjukkan jati diri bangsa dalam konsep nasionalitas.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sebagai wujud sila keempat yaitu Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang Demokratis. Demokrasi Sebuah kata yang setiap Negara/ bangsa selalu mengagungkannya. kata tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa Demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan semua warga bangsa mempunyai kesempatan mewujudkan aspirasinya. Tiap-tiap bangsa mempunyai caranya sendiri mewujudkan demokrasi. Pelaksanaan atau perwujudan demokrasi yang universal dan berlaku bagi semua bangsa. Bahkan dalam satu bangsa dapat terjadi perubahan dalam pelaksanaan demokrasi sesuai dengan perkembangannya. perwujudan demokrasi bagi bangsa Indonesia

tidak sama dan tidak harus sama dengan yang dilakukan bangsa lain, termasuk bangsa Barat yang berbeda pandangan hidupnya dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila telah diakui dan diterima sebagai Filsafah dan Pandangan Hidup Bangsa serta Dasar Negara RI, maka Pancasila harus menjadi landasan pelaksanaan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Bahkan sesuai dengan Tujuan Bangsa dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan, dimana dalam sila ini menunjukkan konsep kedaulatan yang dikenal dengan jati diri bangsa berdasarkan konsep *sovereignty*.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia

Sebagai Wujud sila kelima adalah Kebersamaan, atau bangsa yang menghormati kebersamaan. Keadilan Sosial adalah Jembatan emas menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi keadilan sosial yang dicita-citakan, dan cara merealisasikannya sebenarnya tidak bias dipisah.

Lima prinsip dasar dalam Pancasila sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila merupakan dasar filosofis sekaligus ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu

- 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, merupakan pembeda atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dapat dijadikan pembeda dengan bangsa lainnya di dunia ini. Identitas nasional jati diri nasional merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap bangsa di dunia ini termasuk Indonesia sebagai karakter dan pola perilaku yang seharusnya tertanam kuat sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku atau bersikap di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tatanan kehidupan di negara kita ini dapat berjalan teratur dan sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak dahulu kala.

Jika suatu bangsa tidak mempunyai ciri khas atau cirikhasnya telah pudar karena suatu hal, bangsa tersebut akan mengalami perubahan sikap dan tatanan kehidupan yang terjadi pada masyarakatnya. Mereka akan cenderung meniru perilaku atau cirikhas bangsa lain yang diidolakannya. Padahal ciri khas bangsa lain belum tentu cocok dan sesuai bila digunakan pada bangsa tersebut. Ketidakcocokan tersebut mungkin dikarenakan karena faktor letak geografis, kebudayaan, agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, sejarah pembentukan bangsa, dan sebagainya.

Dampak dari melemahnya atau hilangnya jati diri bangsa dan pola perilaku masyarakat yang baru tersebut tidak sesuai dengan keadaan bangsa itu, maka akan melemahkan keadaan bangsa tersebut dalam berbagai bidang. Sehingga dapat dengan mudah bangsa itu dihancurkan atau dijajah oleh negara lain.

Dari uraian di atas dapat diketahui betapa pentingnya jati diri yang dimiliki oleh setiap bangsa. Maka dari itu dalam tulisan ini telah dikemukakan berbagai kondisi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang merupakan ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan terhadap jati diri bangsa Indonesia saat ini. Yang ternyata karakter bangsa Indonesia ini mulai pudar, sehingga jadi

diri bangsa melemah dan memerlukan langkah-langkah yang efektif untuk merevitalisasi atau memperkuat dan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia agar kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya, dengan demikian jati diri bangsa Indonesia menunjukkan sosialitas

Konsep **religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereignty dan sosialitas**. Membangun jatidiri bangsa Indonesia berarti membangun jatidiri setiap manusia Indonesia, yang tiada lain adalah membangun **Manusia Pancasila**.

7 Revitalisasi Jati Diri Bangsa

Mengapa perlu melakukan penguatan kembali jati diri bangsa?. Apakah sesungguhnya ada yang hilang dari bangsa ini, mengapa tiba-tiba saja masyarakat menjadi beringas, saling serang dan bunuh. Aksi tawuran yang melibatkan pelajar dan antar mahasiswa selalu saja terjadi. Praktik korupsi, kriminalitas, perjudian, perilaku asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, dan perilaku permisif yang tidak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan merupakan sebagian bukti terjadinya dekadensi moral di setiap struktur masyarakat, sebagaimana penulis kemukakan dalam bagian terdahulu.

Lembaga adat sudah tidak berwibawa, aparat keamanan seperti tidak berdaya menghadapi semua ini. Peran lembaga-lembaga tradisional seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang di masa lalu sangat berpengaruh di dalam menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat, kini sudah hilang. Jujur harus diakui bahwa demoralisasi telah melanda negeri ini. Di mana, nilai-nilai moral telah semakin menipis. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini mengalami ambiguitas, yang pada akhirnya terjadi degradasi nasionalisme.

Kondisi obyektif lainnya, yakni kinerja pemerintah tidak secara profesional untuk mengembalikan semangat nasionalisme. Sejak bergulirnya reformasi di negeri ini, bangsa Indonesia telah kehilangan jati diri. Sebagai bangsa yang bermartabat. Di masa dulu bangsa Indonesia mendapat julukan sebagai "bangsa timur" karena perilaku masyarakatnya yang dikenal berbudi pekerti luhur, sabar, ramah, dan santun. Itulah sesungguhnya jati diri yang telah terpatni dan dimiliki rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami patologi sosial yang amat kronis. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum muda dan para pelajar telah tercerabut dari peradaban easterisasi atau ketimuran yang beradab, santun dan beragama. Dengan dalih demi untuk menunjukkan paradigma transparansi, demokratisasi dan keterbukaan, unjuk rasa (bayaran) marak di mana-mana. Rakyat pun bingung, sosok mana yang pantas menjadi figur pemimpin karena yang mengaku tokoh pun kerjanya hanya mengkritik dan menghujat. Bangsa Indonesia seperti sedang berjalan di alam yang gelap gulita, satu sama lain saling bertabrakan atau sengaja untuk bertabrakan.

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman

dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI. Karakter bangsa ini akan menunjukkan jati diri bangsa.

Untuk mencapai karakter bangsa yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan individu-individu yang memiliki karakter. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan karakter bangsa diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun karakter individu (warga negara). Secara psikologis karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/ keimanan. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tecermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan.

Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila pada masing-masing bagian tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik;
- 2) Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif;
- 3) Karakter yang bersumber dari olah raga/ kinestetika antara lain bersih, dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih;
- 4) Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

Olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa sebenarnya saling terkait satu sama lainnya. Oleh sebab itu, banyak aspek karakter yang dapat dijelaskan sebagai hasil dari beberapa proses. Jati diri bangsa tersebut hanya dapat terbentuk melalui contoh perilaku pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, yang mempunyai semangat perubahan, global dan transformational serta tetap memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Tidak harus merupakan negarawan (*statesman*) yang merupakan manusia langka.

Karakter kepemimpinan (Muladi: 2006) yang dapat diteladani tersebut adalah:

- 1) *Change leadership* yang dapat melakukan sinergi positif antara *enthusiasism, energy and hope*, yang selalu menjaga optimisme, pantang menyerah dalam mengejar tujuan, disertai rasa percaya diri di satu pihak dengan *moral purpose, understanding change, coherence making, relationship building and knowledge creation and sharing* di lain pihak. Dalam *culture of change* seorang pemimpin akan mengalami atau menikmati ketegangan yang merupakan kesatuan dalam beratnya memecahkan masalah. Di situlah sebenarnya keberhasilan terbesar terletak pada *effective leaders make people feel that even the most difficult problems can be tackled productively*.
- 2) *Transformational leadership* dengan karakter:
 - a. *Able to set out bold vision;*
 - b. *Skilled in marshalling the intellectual and emotional equity of their people;*
 - c. *Caring for the individual at the highest level;*
 - d. *Ability to mind the mind;*

- e. *Quick to recognize good ideas and have the intellectual honesty;*
 - f. *The imperative on institutionalization, to ensure continuity without disruption;*
 - g. *Willingness to move away from his conventional role;*
- 3) *Global leadership*, yang konsepnya dilandasi oleh keyakinan sosial yang kompleks dan bersifat global, tidak ada model khusus (*single model*) yang cocok terhadap situasi yang sangat luas yang dihadapi seorang pemimpin apapun juga. Dalam hal ini paling tidak terdapat 5 (lima) karakteristik yang muncul (*emerging characteristics*) dalam kerangka kepemimpinan global yaitu:
- a. *Thinking globally* yang mengandung pesan agar pemimpin selalu berusaha untuk memahami keanekaragaman sistem ekonomi, budaya, hukum dan politik, sebagai bagian dari warga negara dunia dengan visi dan nilai-nilai yang *open ended*. *A home centric view will not be tolerated. Global leaders need to have a global level when making decisions (think globally act locally).*
 - b. *Appreciating cultural diversity*, diversitas dalam hal ini diartikan sebagai *diversity of leadership style, industry style, individual behaviors and values, race, religion and sex*, hal ini akan merupakan *a key to competing successfully in the future*.
 - c. *Developing technological savy*, tanpa hal ini masa depan kemitraan dan jaringan global yang terpadu tidak mungkin terjadi.
 - d. *Building partnership and alliances*, kepemimpinan di masa depan akan mensyaratkan tim-tim kepemimpinan yang kolaboratif, setiap tim menguasai pelbagai ketrampilan yang disyaratkan oleh kepemimpinan global.
 - e. *Sharing leadership*, untuk membuat keputusan-keputusan yang efektif. Tidak seperti kepemimpinan individual saat ini, seorang pemimpin yang berhasil di masa depan akan bergerak secara terintegrasi.

Apabila konsep kepemimpinan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka niscaya semua permasalahan bangsa akan dapat dicarikan solusinya, karena perilaku pemimpin suatu bangsa, besar sekali pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat banyak. Bangsa Indoneia memiliki karakteristik masyarakat yang paternalistik yang rakyatnya beroreintasi ke atas. Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru oleh rakyatnya, baik perilaku pemimpin yang baik maupun yang buruk. Maka mulailah dari keteladanan para pemimpin untuk hidup yang wajar yang tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan membangun jati diri yang tangguh, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, maju, demokartis dan modern.

Jati diri bangsa, dapat direvitalisasi melalui pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/ atau kelompok yang unik-baik sebagai warga negara. Hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, salah satu di antara instrumen penting untuk membenahi patologi social yang menimpa bangsa ini adalah melalui pendidikan karakter. Sebagai bangsa yang menganut Islam terbesar di Dunia, hendaknya agama dijadikan ‘ruh’ dalam pendidikan karakter untuk mengembalikan jati diri bangsa. Islam sudah mengajarkan tentang keagungan akhlak mulia. Nabi Muhammad saw sudah mengancam bahwa Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak agar

menjadi mulia. Beliau menyatakan: *“innama buitstu liutammima makarimal akhlak”*. Yang artinya: “sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

Pendidikan karakter sesungguhnya adalah pendidikan yang berbasis pada kejujuran, keikhlasan, tanggungjawab dan keterpercayaan. Jujur dalam segala hal yang dilakukan, ikhlas dalam melakukan segala sesuatu, tanggungjawab ketika diberi amanah dan dipercaya ketika diserahi tanggungjawab. Pendidikan semacam ini akan terlaksana jika semua komponen bangsa ini mendukung terhadapnya. Artinya dibutuhkan lingkungan, pelaku dan juga kebijakan yang memihak kepadanya. Jika tidak didapati kenyataan itu, maka juga akan sia-sia.

Pelaksanaan pendidikan karakter dalam konteks makro kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, merupakan komitmen seluruh sektor kehidupan, bukan hanya sektor pendidikan nasional. Keterlibatan aktif dari sektor-sektor pemerintahan lainnya, khususnya sektor keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, kesehatan, hukum dan hak asasi manusia, serta pemuda dan olahraga juga sangat dimungkinkan.

Dalam revitalisasi jati diri bangsa melalui pendidikan karakter, strategi mikro dalam pendidikan karakter, dapat dilakukan melalui keluarga. Keluarga dapat berperan sebagai fondasi untuk memulai langkah-langkah pembudayaan karakter melalui pembiasaan bersikap dan berperilaku sesuai dengan karakter yang diharapkan. Pembiasaan yang disertai dengan teladan dan diperkuat dengan penanaman nilai-nilai yang mendasari secara bertahap akan membentuk budaya serta mengembangkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itu lingkungan keluarga dapat menjadi pola penting dalam pembudayaan karakter bangsa bagi anak dan generasi muda.

Pemerintah harus menjadi teladan bagi pembudayaan karakter bangsa karena pemerintah harus dapat menjadi contoh warganya. Pemerintahan yang baik mencerminkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang berkarakter mencerminkan warga negara yang berkarakter. Pemerintah dengan demikian harus selalu di garda depan dalam pembudayaan karakter dengan segala manifestasinya. Selain keteladan, pembudayaan dalam lingkup pemerintah dapat dilakukan dengan pembiasaan nilai-nilai di lingkungan pemerintah, peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta penegakan aturan.

8 Penutup

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka nilai yang terkandung dalam agamanya dijadikan dasar membentuk karakter bangsa. Pancasila dijadikan sumber karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila adalah dasarnya, mengingat bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku bangsa dan beranekaragam budaya, maka adalah suatu keharusan dalam menanamkan nilai karakter bangsa berdasarkan nilai budaya yang ada dimana mereka berada. Didalam konteks pendidikan, dengan bersumber dari agama, Pancasila dan budaya maka secara teknis dirumuskan melalui tujuan nasional pendidikan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti. Sumber dimaksud adalah Agama, Pancasila, budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional.

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, sudah ditegaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan rumusan pendidikan berfungsi sebagai media pembentukan watak seperti itu maka secara sosiologis, pendidikan haruslah bisa menghantar manusia Indonesia memiliki kemampuan

menemukan wilayah pemaknaan atas simbol-simbol kehidupan manusia yang berkarakter dan bermartabat.

Pendekatan sosiologi dalam pendidikan karakter, menyediakan berbagai alternative teori dan konsep melalui berbagai perspektif, dalam implementasinya, perlu kesungguhan masyarakat, bangsa dan Negara; khususnya keteladanan pemimpin bangsa yang berkarakter, bermoral dan berahlak mulia serta dapat amanah.

Jati diri adalah, ciri khas atau karakteristik suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa yang lain. Jati diri bangsa merupakan suatu pilihan, dan Jati diri Bangsa Indonesia merupakan pencerminan atau tampilan dari karakter Bangsa Indonesia. Karakter bangsa merupakan akumulasi atau sinergi dari karakter individu anak bangsa yang mengelompok menjadi bangsa Indonesia. Karakter bangsa akan ditampilkan sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari kehidupan nyata dan dirumuskan dalam suatu tata nilai yang kita kenal sebagai Pancasila. Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa ini yang belum tergantikan hingga saat ini. Di dalamnya banyak nilai-nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa.

Bila pemerintah dan masyarakat ingin mengembalikan jati diri bangsa, Maka sebaiknya bangsa ini harus dapat menghayati makna dari semua sila Pancasila, karena memang Pancasila adalah acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bila dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan rumusan nilai-nilai idealisme bangsa yang secara konseptual memberikan tuntunan politik bagi rakyat dan pemerintah tentang bagaimana menemukan pemecahan persoalan negara secara mandiri dan bermartabat. Pancasila dengan ruh **religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereignty dan sosialitas** yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Daftar Pustaka

- Dali Gulo dan Kartini Kartono. 1987. Kamus Psikologi. Bandung, Pionir Jaya
- Efendi, Taufiq, 2008. *Jati Diri Bangsa Indonesia Menuju Indonesia Jaya*. Jakarta, Exatama Mediasindo
- Elmubarak, Z., 2009. *Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai*, Bandung: Alfabeta,
- Endang, Sumantri, 2010. *Pendidikan Karakter Harapan Handal Bagi Masa Depan Pendidikan Bangsa*. UPI
- Kertajaya Hermawan, 2010. Diferensiasi. Jakarta, Gramedia
- Lickona Thomas. 2004. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (dalam Nuraini Farida, 2014. Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Maliki, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muladi. 2006. *Diskusi Panel dengan tema "Revitalisasi Jati Diri Bangsa"* yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Humas, Deputy Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia bersama Biro Kewilayahan dan Wawasan, Deputy Seswapres Bidang Politik pada tanggal 14 Juni 2006 di Kantor Sekretariat Negara RI, Jakarta
- Mulyadi, Seto dkk, 2008. *Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*, cetakan I, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Musthafa, Fuham, Asy-syaikh, 2004. *Manhaj Pendidikan Anak Muslim*, cetakan pertama, Jakarta: MUSTAQIM,

- Muttaqin, Tatang, dkk. 2006. *Membangun Nasionalisme Baru: Bingkai Ikatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Bappenas.
- Shulhan, Najib. 2010. *Pendidikan Berbasis Karakter*, cetakan: pertama, Surabaya: Jaring Pena
- Sofan, Moh. *Pendidikan Berparadigma Profetik: Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2004.
- Suhartono, Suparlan, 2006. *Filsafat pendidikan*, cetakan pertama, Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Suyanto Slamet. 2009. *Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Terpadu*. Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- <https://stf1100025.wordpress.com/2011/07/30/pendidikan-berbasis-karakter/>
- <http://kenakalan-remaja.blogspot.com>